

**HUBUNGAN KARAKTER PERMUKIMAN DENGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS : SURODADI, KELURAHAN SISWODIPURAN DAN
PERUM BUMI SINGKIL PERMAI I DESA KARANGGENENG,
KECAMATAN BOYOLALI)**

Inarotu Duja, Kuswanto Nurhadi, Isti Andini

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
email: inarotuduja@gmail.com

Abstract:

Every citizen who lived in settlements will definitely produce garbage, therefore the volume of waste continues to increase every time. While the final disposal is provided having a limited capacity, so that the waste management at the community level needs to be improved so that the amount of waste that goes to landfill can be reduced. Waste management at the community level is also done in Surodadi, Siswodipuran and Perum Bumi Singkil Permai (BSP) I, Karanggeneng, Boyolali. But to these two regions have different treatment in processing waste. The problem in this research is about how are the relations between the residential character and the community participation in waste management. The method used is the method of description that describes the relationship between the two factors through the depiction of the results of observations, questionnaires and interviews. The results of this study are the difference in terms of residential character, waste management system and participation from the community in garbage penelolaan in both regions. Economic conditions have relation with the community participation in the management of household waste. Livelihood, social and cultural interactions that evolve shown to has a relation with the community participation in the management of household waste. The level of income and education levels have no connection with participation from the community in waste management.

Keywords: *Community Participation, Residentials, Waste Management,*

1. PENDAHULUAN

Sampah dan permukiman merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, karena setiap rumah tangga pasti memproduksi sampah setiap harinya. Cara konvensional yang digunakan untuk menangani permasalahan sampah permukiman adalah dengan membuang sampah ke tempat sampah yang akhirnya dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)

Masalah lain akan timbul ketika kapasitas TPA yang terbatas sedangkan jumlah sampah terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Solusinya adalah mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPA.

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengolah sampah di tingkat rumah tangga. Keberhasilan pengelolaan sampah rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah saja, tetapi ditentukan juga oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahap kegiatan (N. Saribanon dkk, 2007). Dengan memberikan porsi yang besar terhadap masyarakat dalam mengelola sampah diharapkan mampu meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa salah satu dari lima atribut kota hijau adalah kepekaan dan kepedulian masyarakat (Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Pedoman Pelaksanaan 2011).

Seperti daerah lain, Kecamatan Boyolali juga memiliki permasalahan yang sama tentang sampah rumah tangga. Beberapa daerah di Kecamatan Boyolali mulai menerapkan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga untuk mengatasi permasalahan sampah rumah tangga. Dua wilayah yang telah menerapkan pengelolaan sampah rumah tangga adalah permukiman di Surodadi, Kelurahan Siswodipuran dan Perumahan Bumi Singkil Permai 1, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali.

Kedua wilayah tersebut memiliki karakter permukiman yang berbeda dan cara pengelolaan sampah yang berbeda pula. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji hubungan karakter permukiman dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Boyolali.

2. METODE

2.1 Ruang Lingkup

Wilayah penelitian dibatasi di lingkup wilayah Kecamatan Boyolali. Perumahan yang diambil sebagai wilayah kajian adalah lingkungan perumahan di Surodadi, Kelurahan Siswodipuran dan Perumahan Bumi Singkil Permai 1, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali. Batasan aspek yang dibahas pada penelitian ini dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok karakter permukiman, sistem pengelolaan sampah dan karakter partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

2.2 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif di mana data yang ada akan diolah secara deskriptif.

Menurut Nazir (2005) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian dalam meneliti sebuah objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan adalah:

1. Analisis Identifikasi Karakter Permukiman.
2. Analisis Identifikasi Sistem Pengelolaan Sampah.

3. Analisis Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
4. Analisis Hubungan Karakter Permukiman dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Identifikasi Karakter Permukiman

Dalam melakukan analisis identifikasi karakter permukiman dilakukan dengan metode deskripsi dari hasil observasi lapangan dan studi dokumen. Menurut Dyah (2010), karakter permukiman secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Fisik Binaan.
Kelompok ini berkaitan dengan kenampakan fisik perumahan. Terdapat perbedaan antara permukiman di Surodadi dan Perum BSP 1 dari segi fisik binaan. Perumahan formal (Perum BSP 1, Desa Karanggeneng) lebih memiliki keteraturan dalam penataan wilayah dibandingkan dengan perumahan swadaya (Surodadi, Kelurahan Siswodipuran) yang tumbuh secara mandiri.
2. Kondisi Ekonomi.
Penduduk Surodadi lebih didominasi oleh warga yang telah menjadi pensiunan, sedangkan di Perum BSP 1, didominasi oleh warga yang memiliki mata pencaharian sebagai PNS. Dari segi pendapatan, kedua wilayah rata-rata penduduknya memiliki pendapatan lebih dari Rp 1.116.000,00 yang merupakan UMR Boyolali.
3. Kondisi Sosial
Rata-rata tingkat pendidikan penduduk di kedua wilayah sama-sama tinggi karena jumlah penduduk yang telah lulus peruruan tinggi sama-sama tinggi. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, di Surodadi lebih banyak pertemuan yang diadakan, mulai dari unit perkumpulan terkecil yaitu pertemuan Dasa Wisma yang ikuti oleh ibu-ibu. Berbeda dengan Perum BSP 1 di mana pertemuan yang dilakukan warga lebih sedikit karena banyak warga di Perum BSP 1 yang masih aktif bekerja sehingga intensitas pertemuan warga pun agak jarang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa perumahan di Surodadi memiliki interaksi sosial lebih baik dari pada perum

BSP 1, sehingga budaya yang berkembang masih dapat dilestarikan seperti kegiatan kerjabakti dan gotong royong yang masih kerap dilakukan untuk menjaga kebersihan kawasan.

3.2 Analisis Identifikasi Sistem Pengelolaan Sampah

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan maka diperoleh sistem pengelolaan sampah pada masing-masing wilayah sebagai berikut:

1. Proses Pengelolaan sampah.

Pada permukiman di wilayah Surodadi, Kelurahan Siswodipuran proses pengolahan menggunakan sistem bank sampah dan pengomposan. Sedangkan di Perum BSP 1, Desa Karanggeneng proses pengolahan menggunakan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik.

2. Aktor Pengelolaan Sampah.

Masyarakat dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan sampah di Surodadi, Kelurahan Siswodipuran, tidak menutup kesempatan pula bagi pihak lain untuk ikut terlibat dalam mengelola bank sampah, seperti BLH dan pengepul sampah. Berbeda dengan yang dilakukan di Perum BSP 1, Desa Karanggeneng yang lebih banyak mengandalkan pihak luar yaitu petugas kebersihan untuk mengangkut sampah dari rumah tangga ke TPS

3. Jumlah timbulan sampah.

Jumlah timbulan sampah dari permukiman di wilayah Surodadi, Kelurahan Siswodipuran yang dibuang ke TPA berkurang setelah dilakukan pengelolaan sampah. Di Perum BSP 1, Desa Karanggeneng, jumlah timbulan sampah yang dibuang di TPA memiliki jumlah yang tidak jauh berbeda dari sebelum adanya pengelolaan sampah rumah tangga

Sistem pengelolaan sampah di Surodadi lebih teratur dan mendapat respon positif dari masyarakat, sedangkan di Perum BSP 1, pengelolaan sampah yang dilakukan lebih sederhana yaitu hanya dengan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal ini dikarenakan kegiatan pengelolaan sampah di BSP 1 berasal dari pemerintah sehingga

masyarakat tidak merasa memiliki kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga.

3.3 Analisis Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Dalam analisis identifikasi partisipasi masyarakat terlebih dahulu dilakukan menterjemahkan hasil wawancara yang diperoleh ke dalam indikator partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang telah di susun sebelumnya (Lampiran 1, Tabel 1.). Kemudian dihitung rata-rata masing-masing wilayah.

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Item}}$$

$$\text{Surodadi} = \frac{14}{5} = 2,80$$

$$\text{Perum BSP I} = \frac{8}{5} = 1,60$$

Partisipasi masyarakat Surodadi tergolong dalam kategori *Degree of Citizen Power*. Dalam derajat ini masyarakat dinilai telah mampu dan memiliki kewenangan dalam menentukan pengelolaan sampah rumah tangga di wilayahnya. Hal ini dibuktikan dengan segala sesuatu dalam pengelolaan sampah, baik itu berupa inisiatif, sistem pengelolaan, aturan, dan sumberdaya yang digunakan dalam pengelolaan sampah ditentukan oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat Perum BSP 1 dalam mengelola sampah tergolong dalam kategori *non-participation*. Hal ini diperkuat dengan sedikitnya porsi keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah.

3.4 Analisis Hubungan Karakter Permukiman dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Pada analisis untuk mengetahui hubungan antara karakter permukiman dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dibuat matriks yang mengkaitkan antara karakter permukiman dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

3.4.1 Hubungan Kondisi Ekonomi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Tabel hubungan kondisi ekonomi dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilihat di Lampiran 1 pada Tabel 2. Dari tabel tersebut diketahui bahwa:

1. Kawasan dengan dominasi orang yang memiliki mata pencaharian yang lebih fleksibel (dari segi waktu) memungkinkan warganya untuk berkreasi dan memunculkan ide dalam memanfaatkan waktu dan tenaga mereka. Walaupun kedua wilayah sama-sama memiliki pendapatan rata-rata di atas UMR, namun inisiatif untuk mengelola sampah berbeda.
2. Daerah dengan dominasi warga yang bermata pencaharian yang lebih fleksibel waktu kerjanya memungkinkan warganya untuk berkumpul dan menyepakati aturan dalam pengelolaan sampah. Meski rata-rata pendapatan penduduk di kedua wilayah sama-sama tinggi, tetapi dalam proses penyepakatan aturan memiliki perbedaan, sehingga tinggi rendahnya pendapatan tidak berpengaruh dalam penyepakatan aturan.
3. Perbedaan mata pencaharian dan pendapatan tidak mempengaruhi dari mana asal sumberdaya didapat. Hal ini dikarenakan untuk memaksimalkan usaha pengelolaan sampah rumah tangga tidak bisa hanya mengandalkan sumberdaya dari masyarakat itu sendiri, namun juga perlu mencari sumberdaya-sumberdaya lain yang berasal dari luar untuk membantu suksesnya pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah tersebut.
4. Daerah dengan mayoritas warga pensiunan akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk terlibat aktif dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga. Pada kedua wilayah yang sama-sama memiliki rata-rata pendapatan yang tinggi, tetapi keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah berbeda.
5. Daerah dengan warga yang pensiun, memberikan kesempatan bagi semua warga untuk berperan aktif sebagai aktor dalam pengelolaan sampah. Tingkat pendapatan warga yang rendah tidak menjamin keterlibatan warga dalam mengelola sampah rumah tangga baik.

3.4.2 Hubungan Kondisi Sosial dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Tabel hubungan kondisi ekonomi dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

sampah dapat dilihat di Lampiran 2 pada Tabel 3. Dari tabel tersebut diketahui bahwa:

1. Kedua wilayah sama-sama memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi berbeda dalam pengambilan inisiatif. Wilayah dengan interaksi yang baik akan memacu warganya untuk memunculkan ide mengenai pengelolaan sampah. Daerah dengan budaya gotong-royong yang berkembang maka memberikan kesempatan bagi warga untuk memunculkan ide mengenai pengelolaan sampah.
2. Kedua wilayah sama-sama memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi berbeda dalam penyepakatan aturan. Interaksi antar tetangga mempengaruhi penyepakatan aturan dalam pengelolaan sampah. Wilayah dengan interaksi yang baik akan memacu warganya untuk membuat dan menyepakati peraturan mengenai pengelolaan sampah. Daerah dengan budaya gotong-royong yang berkembang maka memberikan kesempatan bagi warga untuk membuat peraturan tentang pengelolaan sampah.
3. Kedua wilayah sama-sama memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dan sama-sama menggunakan sumberdaya dari dalam dan dari luar. Kedua wilayah berbeda dalam interaksi warga, tetapi sama-sama memanfaatkan sumberdaya dari dalam dan dari pihak luar. Kedua wilayah memiliki perbedaan dalam budaya gotong-royong, tetapi sama-sama menggunakan sumberdaya dari dalam dan dari luar.
4. Kedua wilayah sama-sama memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi berbeda dalam peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Wilayah dengan interaksi yang baik akan memacu warganya untuk lebih aktif dan terlibat dalam pengelolaan sampah. Daerah dengan budaya gotong-royong yang berkembang maka memberikan kesempatan bagi warga untuk aktif berpartisipasi dalam setiap proses pengelolaan sampah.
5. Kedua wilayah sama-sama memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi berbeda dalam keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan masyarakat sebagai

aktor pengelola. Wilayah dengan interaksi yang baik akan memacu semua warganya untuk terlibat aktif sebagai aktor pengelola. Daerah dengan budaya gotong-royong yang berkembang maka memberikan kesempatan bagi semua warga untuk aktif dan turut serta sebagai aktor pengelola.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan mengenai hubungan karakter permukiman dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perumahan swadaya dan perumahan formal memiliki beberapa perbedaan. Surodadi sebagai perumahan swadaya memiliki karakter fisik binaan yang tidak teratur. Kondisi ekonomi baik, serta memiliki kondisi sosial yang baik. Perumahan BSP 1 sebagai perumahan formal memiliki fisik binaan yang teratur karena telah direncanakan dan ditata. Kondisi ekonomi yang baik dan kondisi sosial yang kurang baik, terutama dalam hal interaksi bertetangga.
2. Sistem pengelolaan sampah di kedua daerah berbeda. Perumahan swadaya (Surodadi) memiliki sistem pengelolaan sampah yang teratur, sedangkan Perumahan formal (Perum BSP 1) memiliki sistem pengelolaan sampah yang sederhana, banyak bergantung pada bantuan pihak luar dan belum memiliki dampak yang nyata dalam mengurangi timbulan sampah di TPA.
3. Perumahan swadaya Surodadi memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi (*degree of citizen power*). Perumahan formal Perum BSP 1 memiliki tingkat partisipasi yang rendah (*non-participation*) karena masyarakat hanya diberikan komunikasi satu arah dari pemerintah.
4. Hubungan antara karakter permukiman dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut ini:
 - a. Kondisi ekonomi: mata pencaharian memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sampah. Masyarakat yang memiliki waktu kerja yang tidak mengikat atau lebih leksibel memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah lebih baik. Sedangkan tingkat pendapatan tidak memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- b. Kondisi sosial: tingkat pendidikan tidak memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tingkat pengetahuan yang tinggi tidak menjamin masyarakat memiliki partisipasi yang baik dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Sedangkan interaksi sosial dan budaya memiliki hubungan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Interaksi yang baik dan budaya mengenai kebersihan lingkungan yang masih berkembang di masyarakat, memberikan dorongan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

REFERENSI

- Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2011. *Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Panduan Pelaksanaan 2011*. Kementrian Pekerjaan Umum
- N. Saribanon, E. Soetarto, S. Hadi Sutjahjo, E. Gumbira Sa'id, Sumardjo. 2007. *Jurnal: Pendekatan Tipologi dalam Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus : Pengelolaan Sampah Permukiman Berbasis Masyarakat Di Kotamadya Jakarta Timur)*. *Jurnal Teknik Lingkungan*.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Dyah, Ratih Wahyu. 2010. *Jurnal: Penataan Permukiman di Kawasan Segiempat Tunjungan Kota Surabaya*. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*
-

LAMPIRAN 1

Tabel 1. Tabel Penilaian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Variabel Partisipasi	Permukiman Surodadi, Kelurahan Siswodipuran	Skor	Perumahan BSP 1, Desa Karanggeneng	Skor
Asal Inisiatif	Kesepakatan masyarakat	3	Program Pemerintah	1
Proses Penyepakatan Aturan	Aturan ditentukan dan disepakati oleh masyarakat	3	Aturan telah ditetapkan tanpa ada kesepakatan dari masyarakat	1
Asal Sumber Daya	Sumberdaya (tenaga, materi) sebagian berasal dari masyarakat	2	Sumberdaya (tenaga, materi) sebagian berasal dari masyarakat	2
Proses Pengelolaan	Masyarakat terlibat dalam seluruh proses pengelolaan	3	Masyarakat terlibat dalam sebagian proses pengelolaan	2
Aktor Pengelolaan	Seluruh masyarakat merupakan aktor pengelolaan	3	Sebagian masyarakat merupakan aktor pengelolaan	2
Total Skor		14		8

Tabel 2. Tabel Hubungan Kondisi Ekonomi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Variabel Partisipasi	Mata Pencaharian		Pendapatan	
	Surodadi	Perum BSP 1	Surodadi	Perum BSP 1
Asal Inisiatif	Didominasi oleh penduduk yang memiliki jam bekerja tidak mengikat (pensiunan dan ibu rumah tangga), memiliki inisiatif dalam mengelola sampah	Didominasi dengan penduduk yang masih aktif bekerja, tidak memiliki inisiatif untuk mengelola sampah tetapi beri oleh pemerintah	Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, memiliki inisiatif dalam mengelola sampah	Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, tidak memiliki inisiatif dalam mengelola sampah
Proses Penyepakatan Aturan	Didominasi oleh penduduk yang memiliki jam bekerja tidak mengikat (pensiunan dan ibu rumah tangga), membuat aturan dengan keuntungan ekonomis	Didominasi dengan penduduk yang masih aktif bekerja, tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan	Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, membuat aturan yang member keuntungan ekonomis	Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan
Asal Sumber daya Pengelolaan	Didominasi oleh penduduk yang memiliki jam bekerja tidak mengikat (pensiunan dan ibu rumah tangga), memanfaatkan sumberdaya dari dalam dan dari pihak luar	Didominasi dengan penduduk yang masih aktif bekerja, sumberdaya diperoleh dari dalam dan dari pihak luar	Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, menggunakan sumberdaya masyarakat dan bantuan dari luar	Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, sumberdaya diperoleh dari dalam dan dari pihak luar
Proses Pengelolaan Sampah	Didominasi oleh penduduk yang memiliki jam bekerja tidak mengikat (pensiunan dan ibu rumah tangga), terlibat aktif dalam pengelolaan sampah	Didominasi dengan penduduk yang masih aktif bekerja, kurang terlibat dalam pengelolaan sampah	Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, terlibat aktif dalam pengelolaan sampah	Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, kurang terlibat dalam pengelolaan sampah
Aktor Pengelolaan Sampah	Didominasi oleh penduduk yang memiliki jam bekerja tidak mengikat (pensiunan dan ibu rumah tangga), semua masyarakat terlibat	Didominasi dengan penduduk yang masih aktif bekerja, hanya sebagian warga yang mau berpartisipasi	Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, melibatkan semua masyarakat	Didominasi penduduk dengan rata-rata pendapatan diatas UMR, hanya sebagian masyarakat yang terlibat

LAMPIRAN 2

Tabel 3. Tabel Hubungan Kondisi Sosial dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Variabel Partisipasi	Kependudukan		Interaksi dengan tetangga		Budaya	
	Surodadi	Perum BSP 1	Surodadi	Perum BSP 1	Surodadi	Perum BSP 1
Asal Inisiatif	Tingkat pengetahuan yang tinggi, memiliki inisiatif dalam mengelola sampah	Tingkat pengetahuan yang tinggi, tidak memiliki inisiatif dalam mengelola sampah	Interaksi antar tetangga yang baik, memiliki inisiatif dalam mengelola sampah	Interaksi antar tetangga yang kurang baik, tidak memiliki inisiatif dalam mengelola sampah	Budaya gotong royong berkembang, memiliki inisiatif dalam mengelola sampah	Budaya gotong royong yang kurang berkembang, tidak memiliki inisiatif untuk mengelola sampah
Proses Penyepakatan Aturan	Tingkat pengetahuan yang tinggi, memiliki kesempatan untuk membuat peraturan	Tingkat pengetahuan yang tinggi, tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan	Interaksi antar terangga yang baik, memiliki kesempatan untuk membuat peraturan	Interaksi antar tetangga yang kurang baik, tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan	Budaya gotong royong berkembang , membuat aturan dengan keuntungan ekonomis	Budaya gotong royong berkembang, tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan
Asal Sumber daya Pengelolaan	Tingkat pengetahuan yang tinggi, menggunakan sumberdaya masyarakat dan bantuan dari luar	Tingkat pengetahuan yang tinggi, sumberdaya diperoleh dari dalam dan dari pihak luar	Interaksi antar terangga yang baik, menggunakan sumberdaya masyarakat dan bantuan dari luar	Interaksi antar tetangga yang kurang baik, sumberdaya diperoleh dari dalam dan dari pihak luar	Budaya gotong royong berkembang , memanfaatkan sumberdaya dari dalam dan dari pihak luar	Budaya gotong royong berkembang, sumberdaya diperoleh dari dalam dan dari pihak luar
Proses Pengelolaan Sampah	Tingkat pengetahuan yang tinggi, terlibat aktif dalam pengelolaan sampah	Tingkat pengetahuan yang tinggi, kurang terlibat dalam pengelolaan sampah	Interaksi antar terangga yang baik, terlibat aktif dalam pengelolaan sampah	Interaksi antar tetangga yang kurang baik, kurang terlibat dalam pengelolaan sampah	Budaya gotong royong berkembang , terlibat aktif dalam pengelolaan sampah	Budaya gotong royong berkembang, kurang terlibat dalam pengelolaan sampah
Aktor Pengelolaan Sampah	Tingkat pengetahuan yang tinggi, melibatkan semua masyarakat	Tingkat pengetahuan yang tinggi, hanya sebagian masyarakat yang terlibat	Interaksi antar terangga yang baik, melibatkan semua masyarakat	Interaksi antar tetangga yang kurang baik, hanya sebagian masyarakat yang terlibat	Budaya gotong royong berkembang , semua masyarakat terlibat	Budaya gotong royong berkembang, hanya sebagian warga yang mau berpartisipasi